



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL
BAGIAN PERENCANAAN

LEMBAR DISPOSISI
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN

Yth. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN		
Nomor /Tgl Agenda	S.22_ 214 / 3 Februari 2022	
Surat Dari	IT.Investigasi	
Nomor / Tgl Surat	031/IT.INV/I/2022 / 26 Januari 2022	
Perihal	Laporan Kinerja IT.Investigasi TA 2021	
<input type="checkbox"/> SANGAT SEGERA	<input checked="" type="checkbox"/> SEGERA <input type="checkbox"/> BIASA <input type="checkbox"/> RAHASIA	
Diteruskan Kepada Yth.		
<input type="checkbox"/> Kepala Sub bagian Program dan Anggaran	<input checked="" type="checkbox"/> Kepala Sub bagian Analisa dan Evaluasi	
Isi Disposisi		
<input type="checkbox"/> Agendakan / Jadwalkan <input type="checkbox"/> Telaah / Evaluasi <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan <input type="checkbox"/> Laporkan <input type="checkbox"/> Tanggapan / Saran <input type="checkbox"/> Harap Mewakili <input type="checkbox"/> Hadir Bersama Saya <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Untuk Dipelajari	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diselesaikan <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Dikoordinasikan <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Ditindaklanjuti <input type="checkbox"/> Melaporkan Hasilnya <input type="checkbox"/> Untuk Dipergunakan <input type="checkbox"/> Untuk Dipantau	
Catatan: <i>- cek & e - subrip</i> <i>- tag sethis agar segera finalkan,</i> <i>Jangan pernah upload ke e-sacip</i>		
Isi Disposisi Kepala Sub Bagian		
<input type="checkbox"/> Fahmi Saidi <input type="checkbox"/> Setyo Wahyudi <input type="checkbox"/> Agus Tri Atmojo <input type="checkbox"/> Amin Suyitno <input type="checkbox"/> Ivonne Pradistya <input type="checkbox"/> Anis Lestari <input type="checkbox"/> Sucianny Putri	<input checked="" type="checkbox"/> Nila Finarti <input type="checkbox"/> Uga Prathama <input type="checkbox"/> Zullaichah <input type="checkbox"/> Arif Rofi Setiawan <input type="checkbox"/> Mahmed Yanusholi Suhadi <input type="checkbox"/> Rifqi Burhanuddin <input type="checkbox"/> Muhammad Tanju <input type="checkbox"/> Claudi Priambodo	<input type="checkbox"/> Catur Sigit Nugroho <input type="checkbox"/> Ramzan Pasada
Catatan :		<i>Jika belum final di pingin</i> <i>3/2/2022</i>



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

NOTA DINAS

Nomor: 03) /IT.INV//2022

Kepada Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur Investigasi
Perihal : Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 26 Januari 2022

Dengan hormat, menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Inspektorat Investigasi, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wahyu Adji H., S.H., DESS., CGOP., CLA.
NIP. 19651022 199203 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Kepala Bagian Perencanaan.





2021

**LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2021**





KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Investigasi Tahun 2021 merupakan gambaran pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi selama Tahun 2021, yang disusun sebagaimana Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya di lingkungan Inspektorat Investigasi sebagai salah satu prasyarat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel serta bebas KKN sehingga tugas dan fungsi dapat berjalan efisien, efektif, transparan serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan (*good governance*).

Ruang lingkup Laporan Kinerja ini merupakan penjabaran atas visi, misi, tujuan, dan sasaran serta kebijakan dan program yang Inspektorat Investigasi Tahun 2021 yang berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2021 menguraikan capaian kinerja yang didukung oleh sumber informasi dan data yang valid. Diuraikan juga factor pendorong dan penghambat tercapainya sasaran kinerja guna perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif bagi pemangku kepentingan dan memadai untuk digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan khususnya dalam bidang pengawasan investigatif.

Jakarta, 26 Januari 2022
INSPEKTUR INVESTIGASI

WAHJU ADJI H., S.H., DESS., CGOP., CLA.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630208 198303 1 002





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

EXECUTIVE SUMMARY v

BAB I PENDAHULUAN 1

 I. 1. Latar Belakang 1

 I. 2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Investigasi 1

 I. 3. Struktur Organisasi 2

 I. 4. Sumber Daya Manusia Inspektorat Investigasi 5

 I. 5. Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan 6

 I. 6. Sistematika Laporan 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021 10

 II. 1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis 10

 II. 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 10

 II. 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021 12

 III. 1. Tahapan Pengukuran Kinerja 12

 III. 2. Pengukuran Capaian Kinerja 12

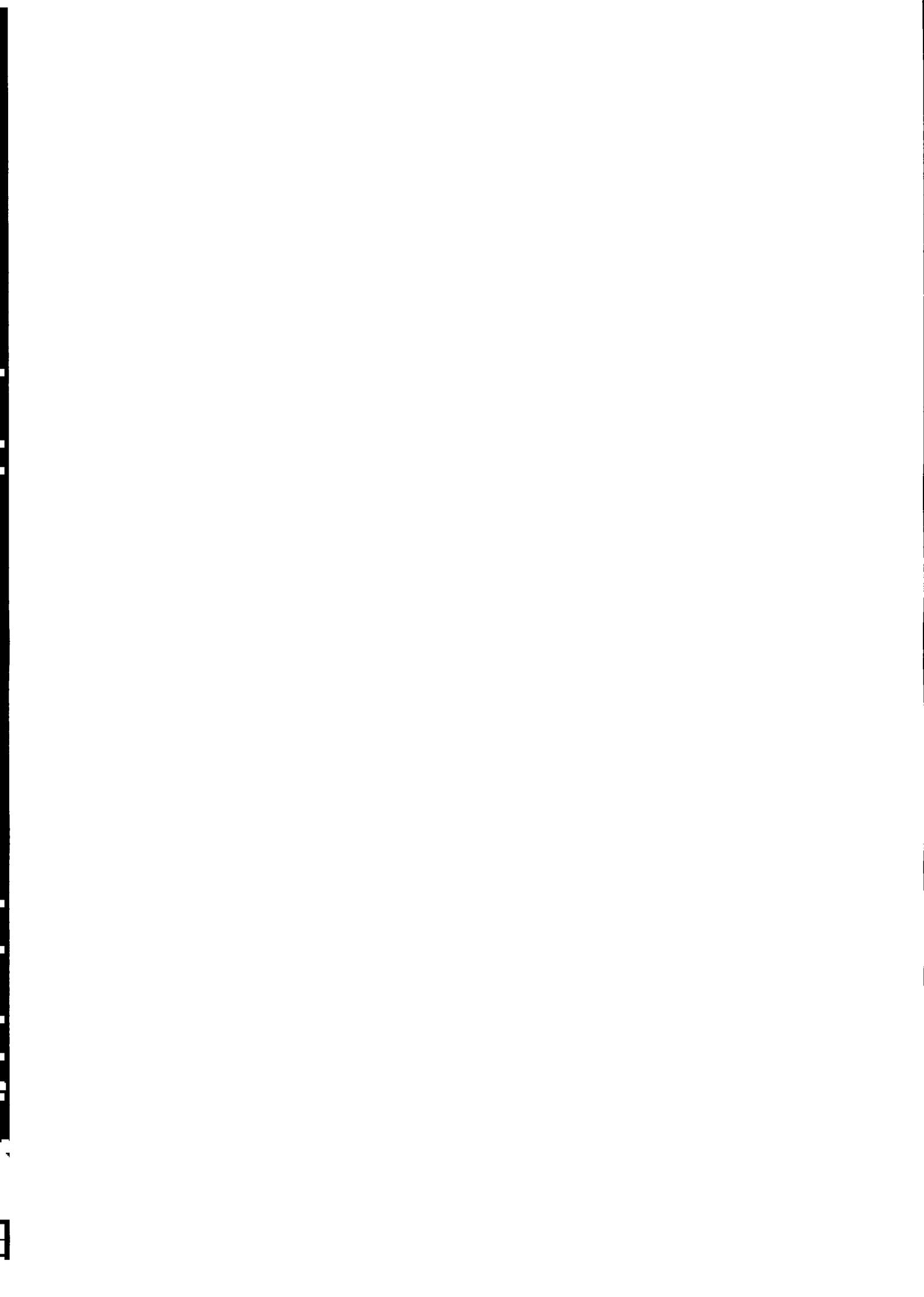
 III. 3. Realisasi Anggaran 23

BAB IV PENUTUP 24

 IV. 1. Kesimpulan 24

 IV. 2. Saran Tindak Lanjut 25

LAMPIRAN





DAFTAR GAMBAR

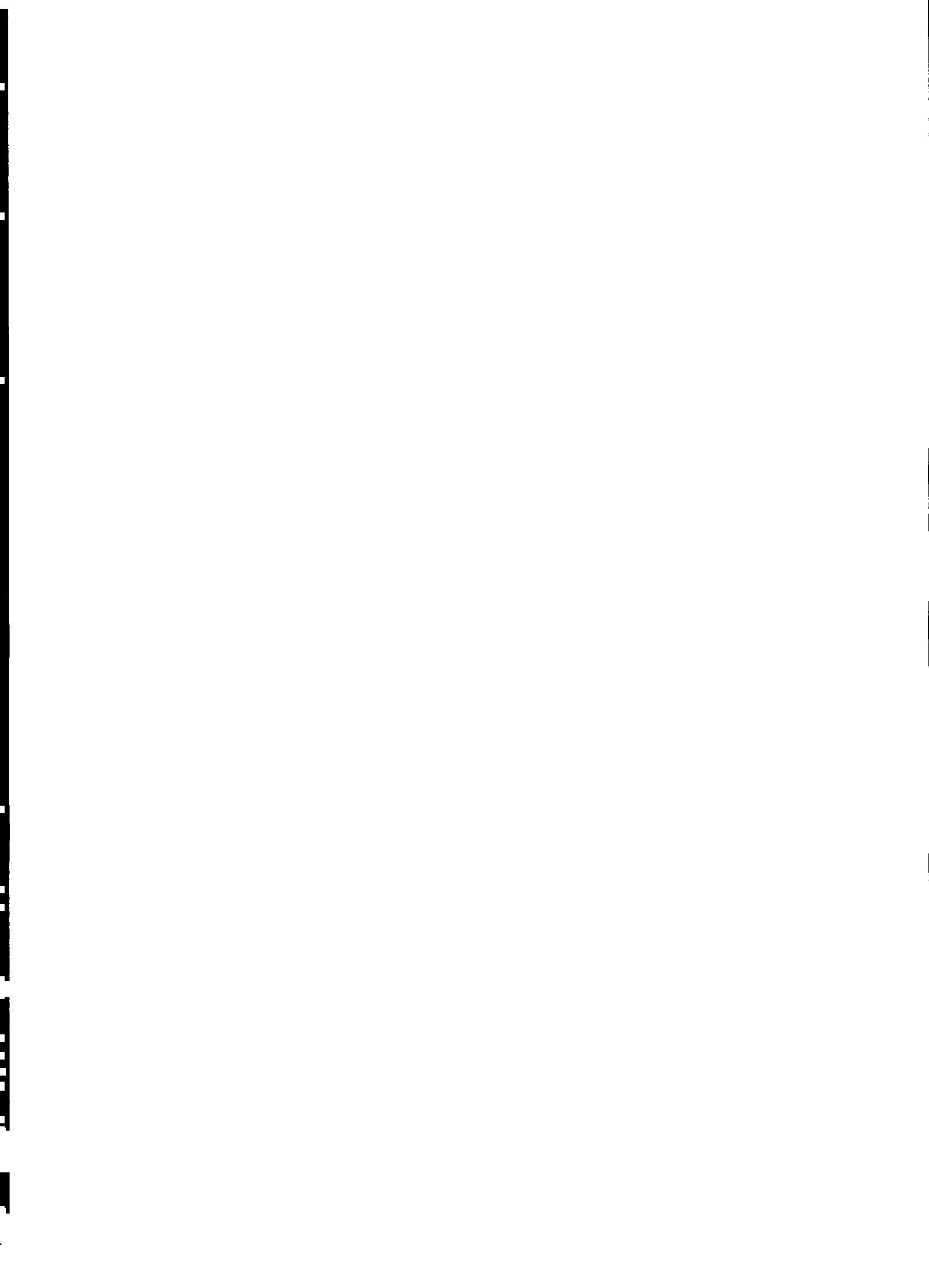
Gambar 1- Struktur Organisasi 2

Gambar 2 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 6

Gambar 3 - Grafik Penanganan Pengaduan per Korwil 16

Gambar 4 - Tindak Lanjut pengaduan 16

Gambar 5 - Jumlah Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi 17





DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Pembagian Wilayah Penugasan 3

Tabel 2 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan..... 6

Tabel 3 - Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Investigasi Tahun 2021..... 10

Tabel 4 - Perjanjian Kinerja Tahun 2021..... 11

Tabel 5 - Realisasi Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021..... 12

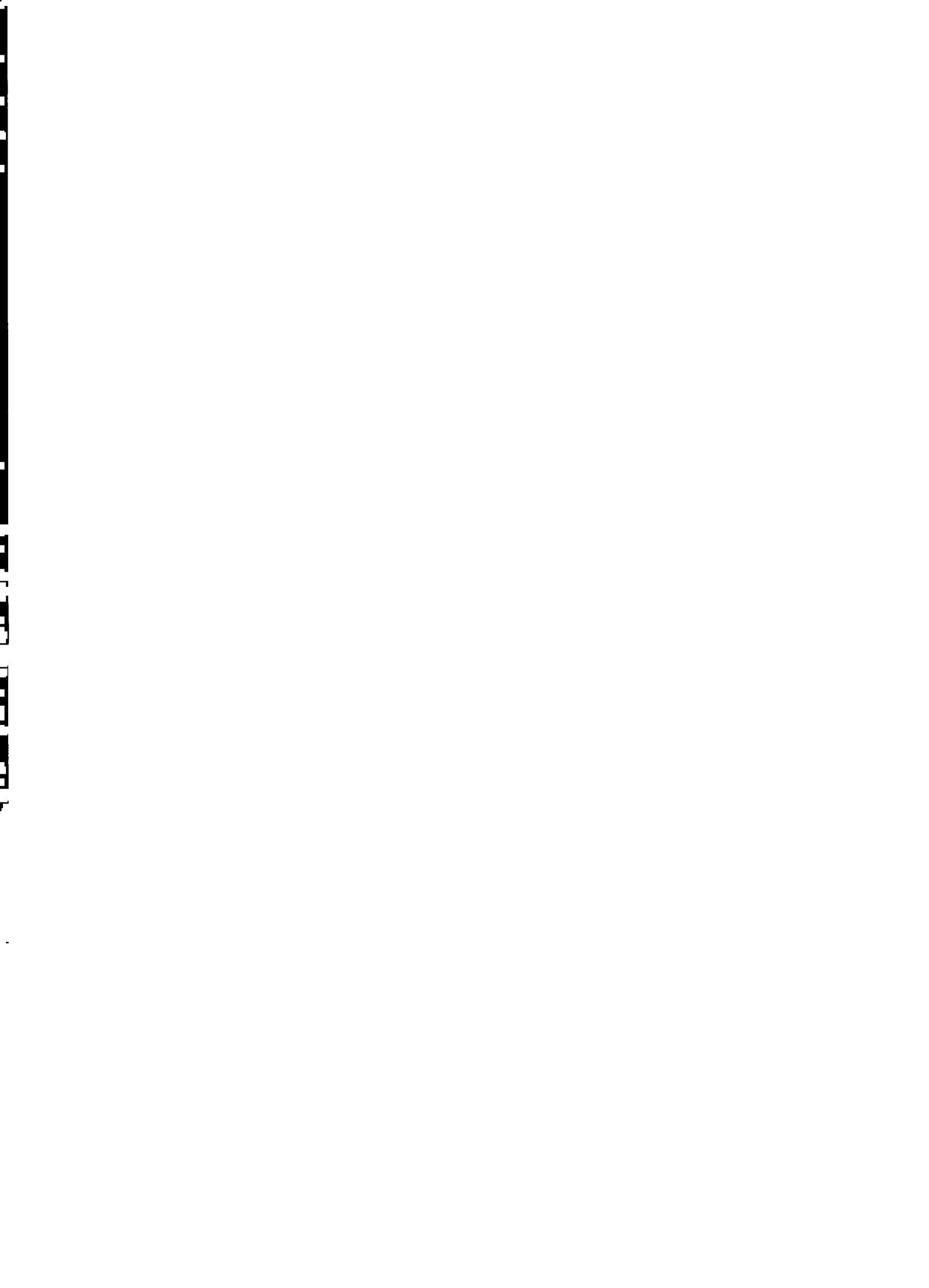
Tabel 6 - Hasil Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat Jenderal oleh Auditi
Tahun 2021 15

Tabel 7- Daftar Unit Kerja Kemenhub yang Mendapatkan Predikat
WBK/WBBM..... 18

Tabel 8- Perbandingan Target - Realisasi Kinerja Tahun 2020-2021 21

Tabel 9 - Perbandingan Target dan Realisasi dalam Renstra 2020-2024 21

Tabel 10 - Realisasi Anggaran Tahun 2021 23





EXECUTIVE SUMMARY

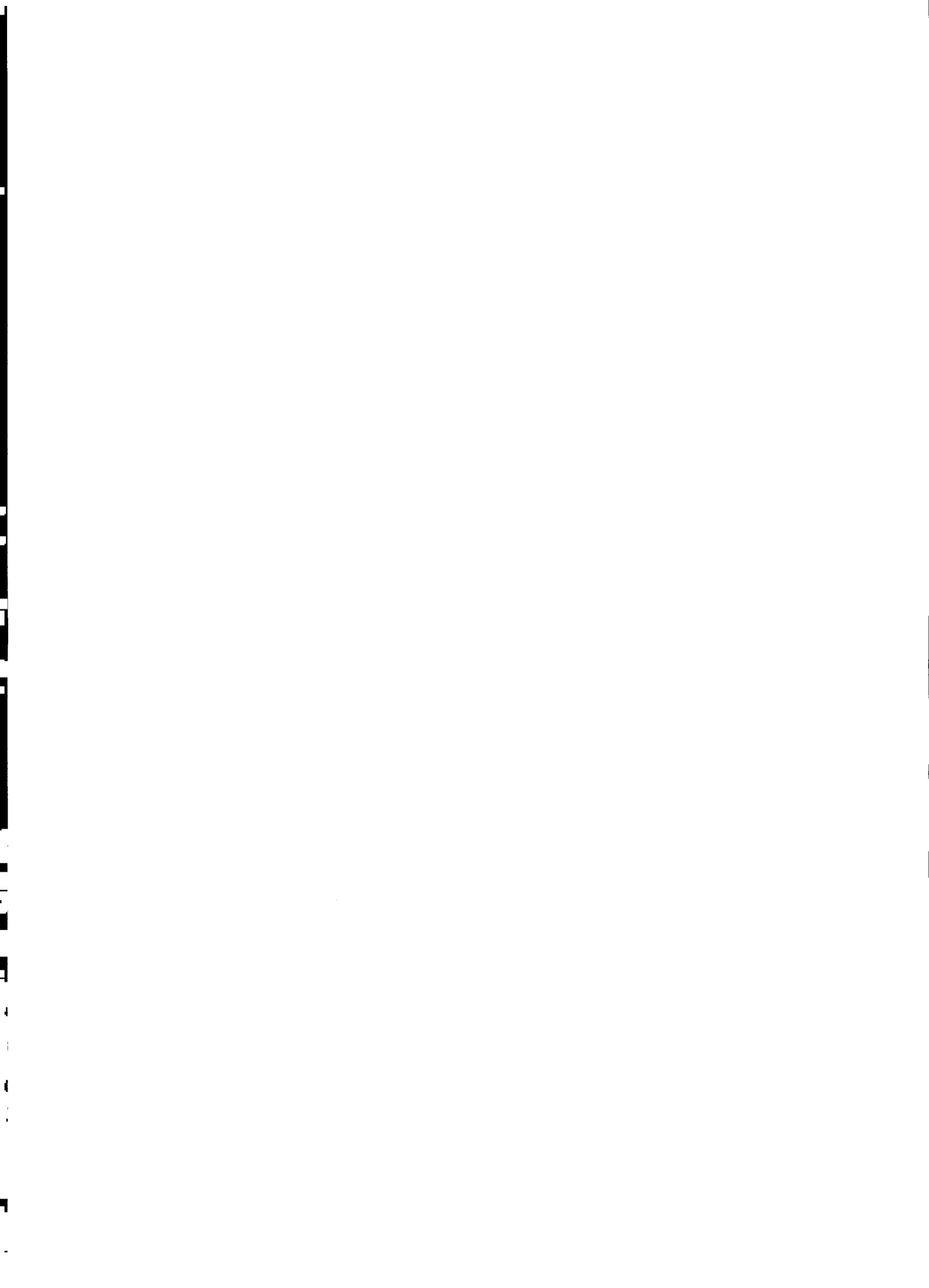
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, pasal 603 dinyatakan bahwa Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif. Dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Investigasi mengacu kepada Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Investigasi 2020-2024 serta Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi selama Tahun 2021 mengacu kepada Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi yang merupakan penjabaran dari Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024. Pada akhir tahun 2021, pengukuran dilakukan pada tingkat capaian/keberhasilan.

Berdasarkan hasil evaluasi perhitungan pengukuran kinerja, nilai capaian kinerja Inspektorat Investigasi adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1 Implementasi pengawasan yang berkualitas	1 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Persentase 65	85,23%	131,12%
	2 Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase 85	100%	117,65%
2 Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	3 Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit 3	17	566,67%

Secara keseluruhan tingkat kepuasan auditi terhadap kegiatan penjaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) adalah sebesar 85,23%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa merasa sangat puas terhadap kegiatan penjaminan (*assurance*) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal jika ditinjau dari indikator aspek pelayanan yaitu Tangible, Reliability, Eesponsiveness, Assurance,

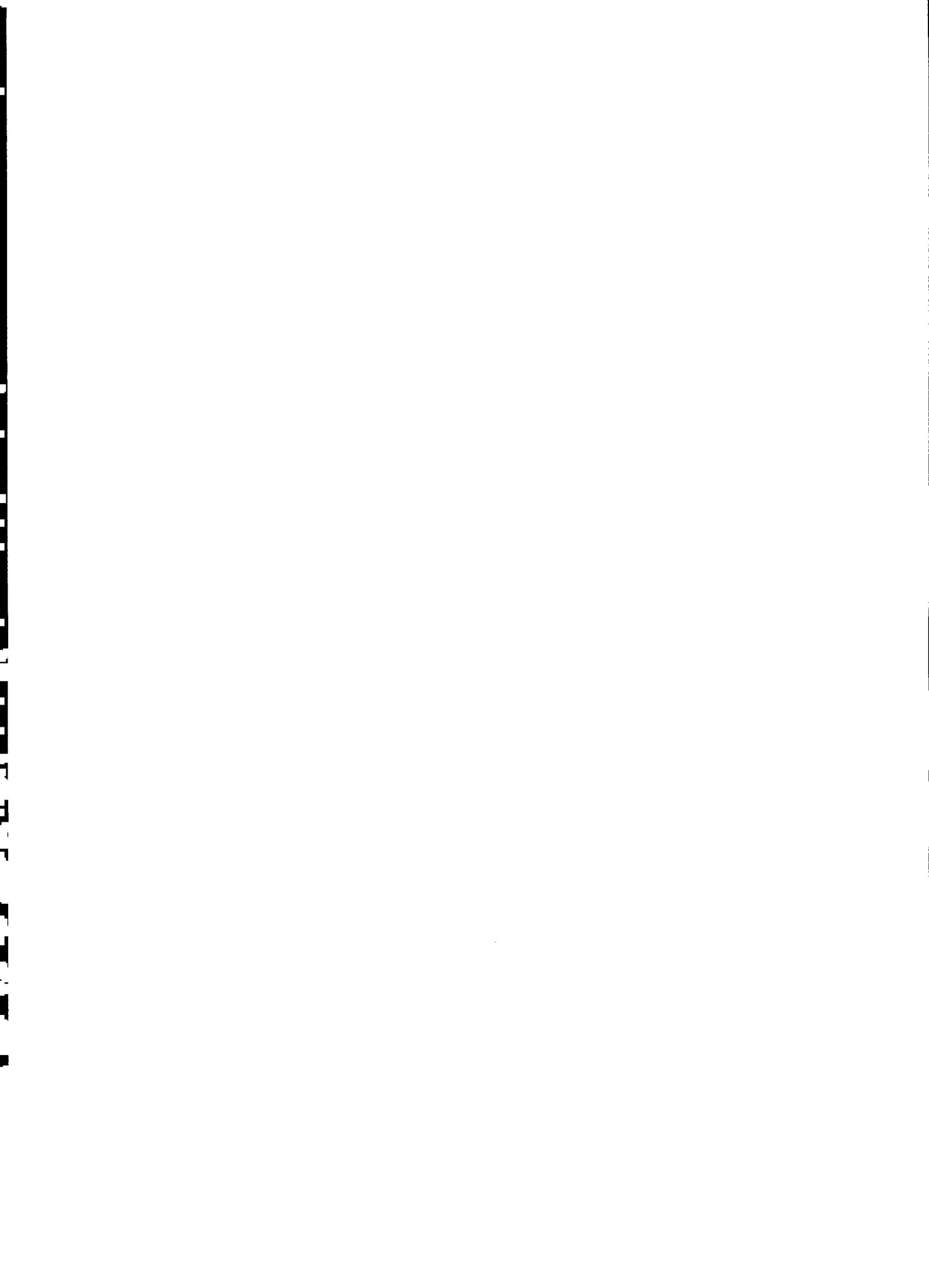




dan Empaty. Berdasarkan pengaduan yang masuk selama tahun 2021 yaitu 122 pengaduan, semua telah ditindaklanjuti dengan status pengaduan selesai sejumlah 71 pengaduan, proses sebanyak 28 pengaduan, dilimpahkan ke instansi lain sebanyak 8 pengaduan, serta 14 pengaduan ditolak. Jumlah unit kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM sebanyak 17 unit kerja dengan 4 unit kerja mendapatkan predikat WBBM dan 13 unit kerja mendapatkan predikat WBK.

Dari segi anggaran, terdapat refocusing anggaran Inspektorat Investigasi dari semula **Rp9.287.240.000,-** menjadi **Rp4.036.080.000** atau mengalami penurunan menjadi **43,46% dari pagu awal**. Refocusing anggaran Inspektorat Investigasi tetap digunakan untuk pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2021.

Secara umum disimpulkan bahwa program kerja Inspektorat Investigasi dalam tahun 2021 telah melebihi target awal yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Hal ini menjadi gambaran bahwa Inspektorat Investigasi telah bekerja secara optimal dalam penyelesaian semua pengaduan dan menunjukkan bahwa pengawasan intern yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dipandang telah memberikan nilai tambah bagi Auditi pada berbagai level baik level pimpinan maupun pelaksana di Unit Pelaksana Teknis. Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2021 akan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021.





BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Inspektorat Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 67 Tahun 2021 pasal 603 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif.

Rencana Kinerja Inspektorat Investigasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024. Pada setiap akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang menggambarkan sisi keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Investigasi Tahun 2021 merupakan sarana perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi selama Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Investigasi tahun 2021 terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu Terwujudnya Implementasi Pengawasan yang Berkualitas dan Organisasi *Fit For Purpose*. Adapun indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi;
2. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM.

I. 2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Investigasi

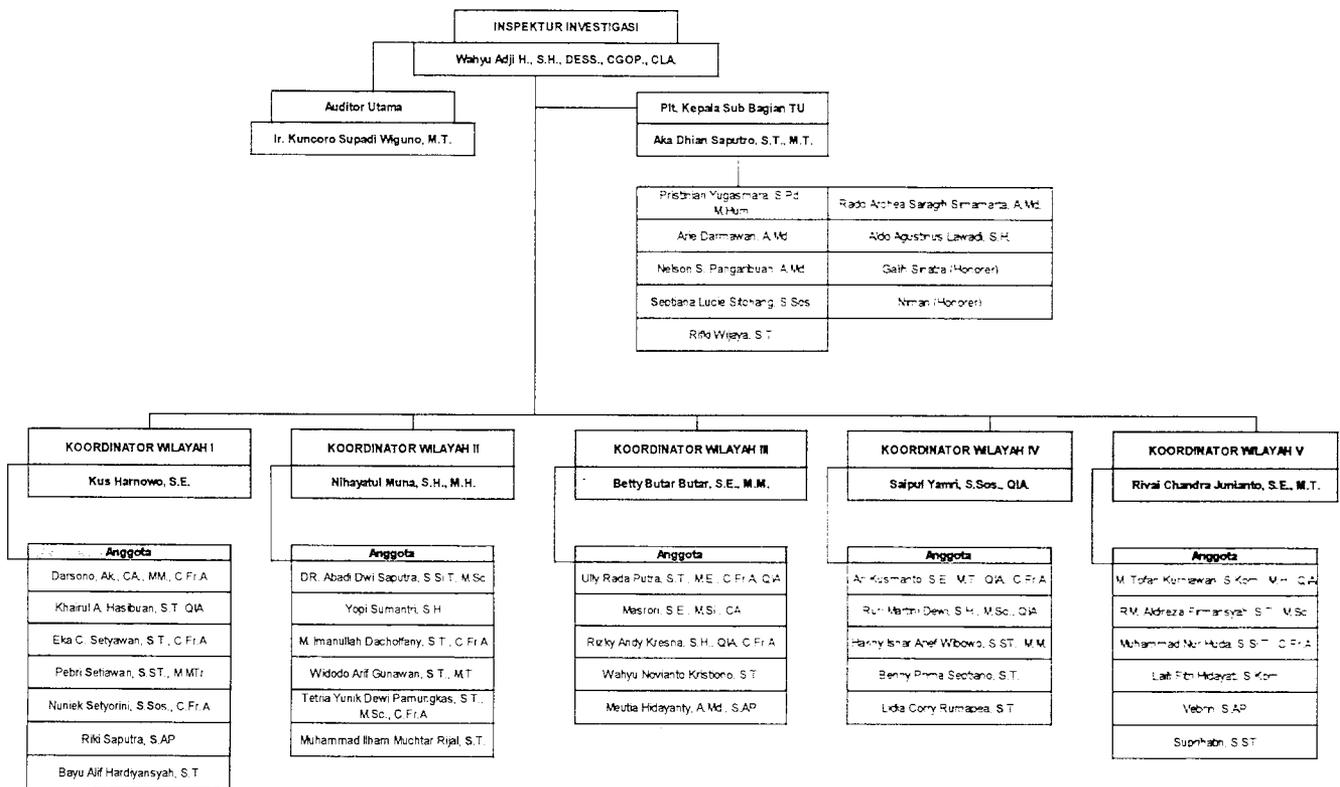
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 PM 67 Tahun 2021, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan investigatif;
- b. penyusunan rencana program kerja pengawasan investigatif;
- c. pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara;
- d. pengawasan intern terhadap pelanggaran administrasi;
- e. pelaksanaan penanganan dan pemantauan laporan pelanggaran dan pengaduan masyarakat;
- f. penugasan lain berdasarkan instruksi khusus Inspektur Jenderal dan/atau Menteri; dan
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif.
- h. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi

I. 3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi telah ditetapkan struktur organisasi dan tata kerjanya yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1- Struktur Organisasi





Penjelasan untuk uraian pekerjaan masing-masing tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Tata Usaha yang dipimpin Kepala Sub. Bagian Tata Usaha membawahi beberapa orang jabatan fungsional umum (JFU), dan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat Investigasi. Secara fungsional dan administrasi bertanggungjawab kepada Inspektur Investigasi.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Investigasi

1) Koordinator Wilayah (Korwil)

a. Mengkoordinir tugas-tugas pengawasan investigasi, penanganan dan pemantauan pengaduan masyarakat sesuai dengan pembagian wilayah penugasan berdasarkan Perirjen Kemenhub No.SK.52/HK.202/ITJEN-2019 sebagai berikut:

Tabel 1 - Pembagian Wilayah Penugasan

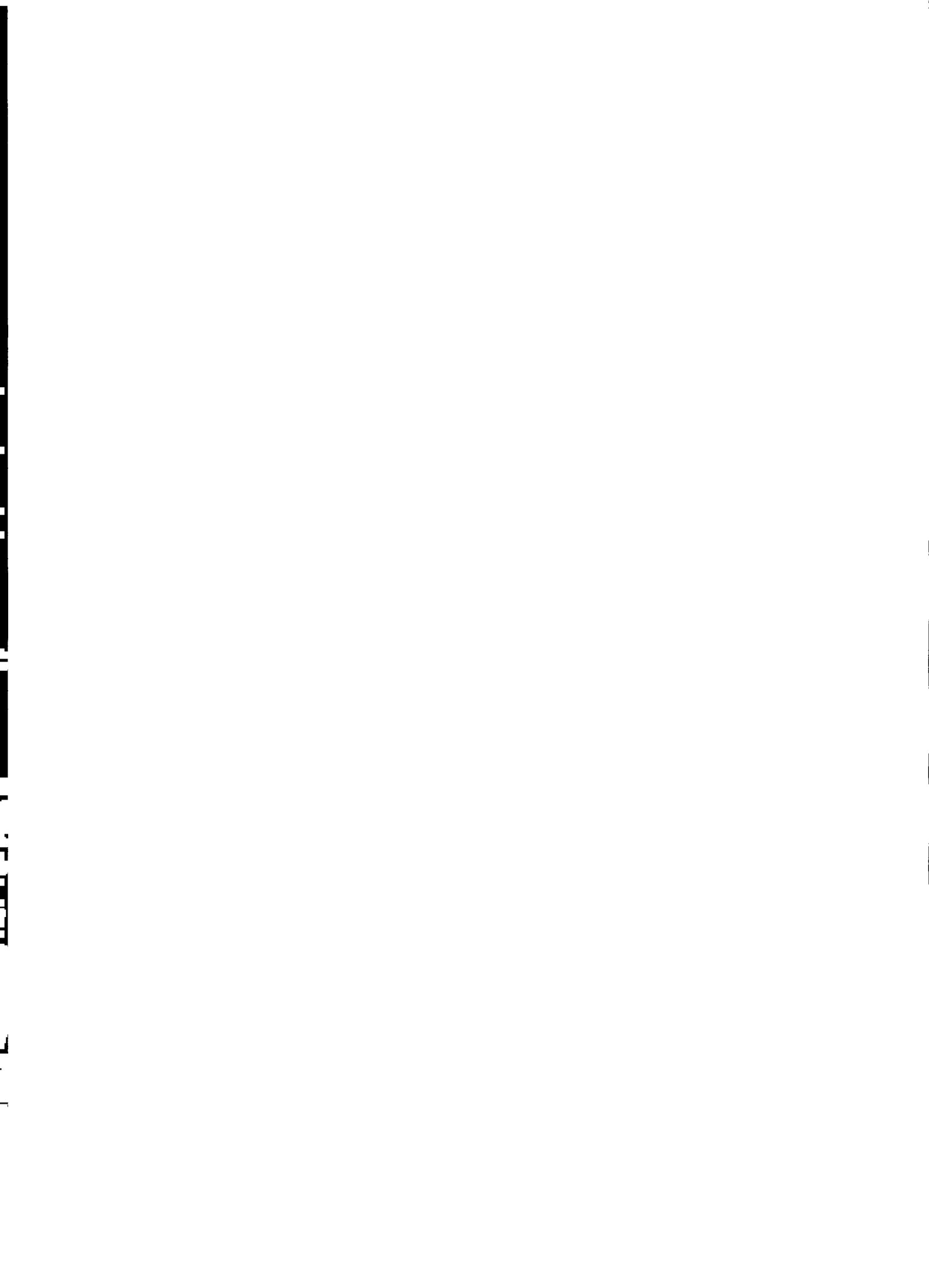
Koordinator Wilayah	Wilayah	Provinsi
Korwil I	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Aceh
		Sumatera Barat
		Papua Barat
		Bali
		Sulawesi Utara
		Kalimantan Tengah
		Maluku Utara
		Jawa Tengah
		Sulawesi Barat
Korwil II	Kantor Pusat	Sekretariat Jenderal
		Inspektorat Jenderal
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
		Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
		Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Korwil III	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Sumatera Utara
		Bangka Belitung
		Banten
		Jawa Barat





Koordinator Wilayah	Wilayah	Provinsi
	dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Sulawesi Selatan Maluku
Korwil IV	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Riau Bengkulu Jambi Jawa Timur Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
Korwil V	Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kepulauan Ria Sumatera Selatan Lampung DKI Jakarta Kalimantan Barat Gorontalo Sulawesi Tenggara Papua

- b. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. Mengkoordinir pelaksanaan pendeteksian indikasi kecurangan dalam proses pelelangan secara elektronik;
- d. Mengkoordinir tugas-tugas pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. Mengkoordinir tugas-tugas pelaksanaan penanganan Whistleblowing System di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- f. Mengkoordinir tugas-tugas pelaksanaan survei penilaian integritas;
- g. Mengkoordinir kegiatan pengelolaan zona integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- h. Mengkoordinir pelaksanaan tugas lain sesuai penugasan Inspektur Investigasi.





2) Auditor

- a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan investigasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas penanganan dan pemantauan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan di lingkup Inspektorat Investigasi serta pengawasan lainnya di lingkup Inspektorat Investigasi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai penugasan Inspektur Investigasi.

3) Auditor Kepegawaian

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas PNS serta jabatan fungsional;
- b. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitas pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas PNS serta jabatan fungsional;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang formasi, pengadaan, pasca pendidikan dan pelatihan, kepangkatan dan pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, kinerja, kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun, serta kinerja pegawai;
- d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengawasan kepegawaian; dan
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai penugasan Inspektur Investigasi.

I. 4. Sumber Daya Manusia Inspektorat Investigasi.

Jumlah SDM Inspektorat Investigasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut:



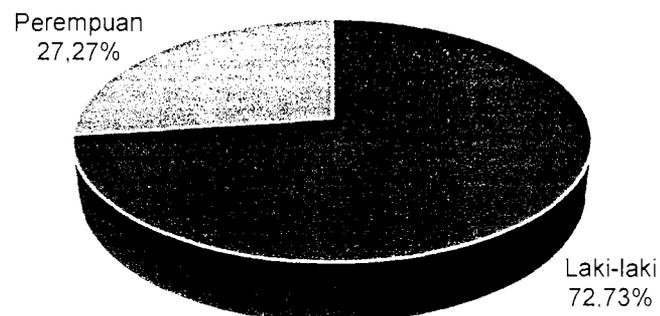


1. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

Tabel 2 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Inspektur	1
2	Auditor Utama	1
3	Auditor Madya	4
4	Auditor Muda	16
5	Auditor Pertama	13
6	Auditor Pertama Lanjutan	0
7	Kasubag TU	1
8	Analisis LHA dan Sanggahan Pengaduan	2
9	Analisis Data	1
10	Pengelola Data Administrasi Umum	1
11	CPNS	3
Total		44

2. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

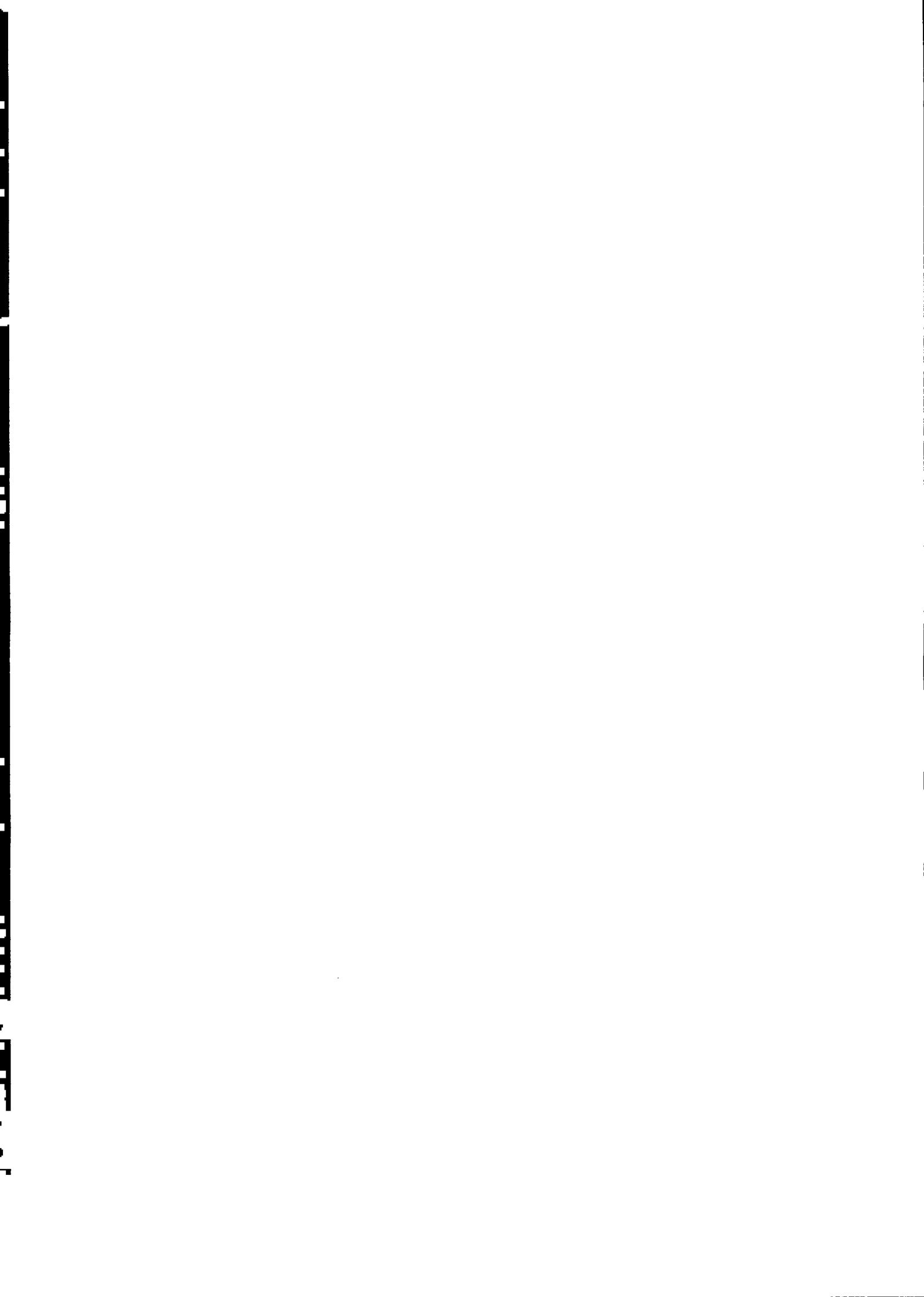


Gambar 2 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

I. 5. Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan

1. Potensi

Inspektorat Investigasi telah didukung dengan Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Sarana-Prasarana yang cukup memadai untuk pencapaian





target Kinerja. Beberapa potensi yang dapat dioptimalkan dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian besar Auditor telah dibekali dengan Pendidikan dan pelatihan audit investigasi sebagai modal dasar penanganan pengaduan;
- b. Pimpinan yang kondusif dan mendukung aktif upaya penyelesaian permasalahan khususnya pengaduan;
- c. Anggaran yang mencukupi, meskipun dalam perjalanannya memperoleh penghematan anggaran yang cukup signifikan;
- d. Beberapa sarana audit investigasi sudah tersedia guna menunjang audit investigasi.

2. Isu Strategis

Proses pelaksanaan kegiatan inspektorat Investigasi bergerak atas isu-isu ataupun permasalahan yang nyata timbul melalui pengaduan, maupun fenomena yang ada dimasyarakat. Salah satu isu strategis yang ditangani oleh Inspektorat Investigasi Tahun 2021 adalah banyaknya pengaduan masyarakat perihal proses pendanaan barang dan jasa, pelayanan publik dan permasalahan kepegawaian di lingkungan kementerian perhubungan.

Isu strategis tersebut merupakan buah koordinasi antara inspektorat investigasi dengan pihak-pihak terkait baik Aparat Penegak Hukum maupun dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengubah cara kerja audit tidak lagi menggunakan cara yang konvensional. Sehingga diperlukan teknologi informasi dalam membantu kegiatan audit.

3. Permasalahan

Beberapa hal yang dianggap sebagai masalah internal terhadap pencapaian pengawasan internal secara maksimal adalah sebagai berikut:

- a. Respon auditi dan Biro LPPBMN dalam memberikan tanggapan atas permintaan penjelasan pada pengaduan yang berkaitan proses pengadaan barang/ jasa melebihi batas waktu yang ditentukan;
- b. Surat permintaan pendapat (second opinion) kepada instansi lain seperti LKPP tidak direspon;





- c. Masih terdapat pengaduan yang masuk tidak memenuhi unsur 5W+1H maupun bukti-bukti awal yang cukup khususnya yang melalui Aplikasi SIMADU sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;
- d. Belum dilengkapinya dukungan sarana dan prasarana Audit Investigatif khususnya digital forensik, mengingat dunia IT sekarang berkembang dengan sangat pesat.

I. 6. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2021.

DAFTAR ISI Menyajikan isi masing-masing bab dan subbab beserta halaman dari laporan Kinerja Inspektorat Investigasi

DAFTAR GAMBAR Menyajikan gambar-gambar yang ada untuk mendukung penjelasan dari Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi

DAFTAR TABEL Menyajikan tabel-tabel yang ada untuk mendukung penjelasan dari Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2021.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2021, tugas dan fungsi, Sumber Daya Manusia, Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan, Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan ringkasan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja





III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Menyajikan capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2021 dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- b. Perbandingan target terhadap realisasi kinerja Tahun 2020-2021
- c. Perbandingan target terhadap realisasi kinerja Tahun 2021 dalam renstra unit kerja Tahun 2020-2024
- d. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indicator Kinerja Kegiatan Tahun 2021
- e. Analisis Efisiensi Sumber Daya

III.3 Realisasi Anggaran

- a. Alokasi Total Anggaran Tahun 2021
- b. Analisis Dana yang Tidak Terserap dalam Inspektorat Investigasi

BAB IV PENUTUP

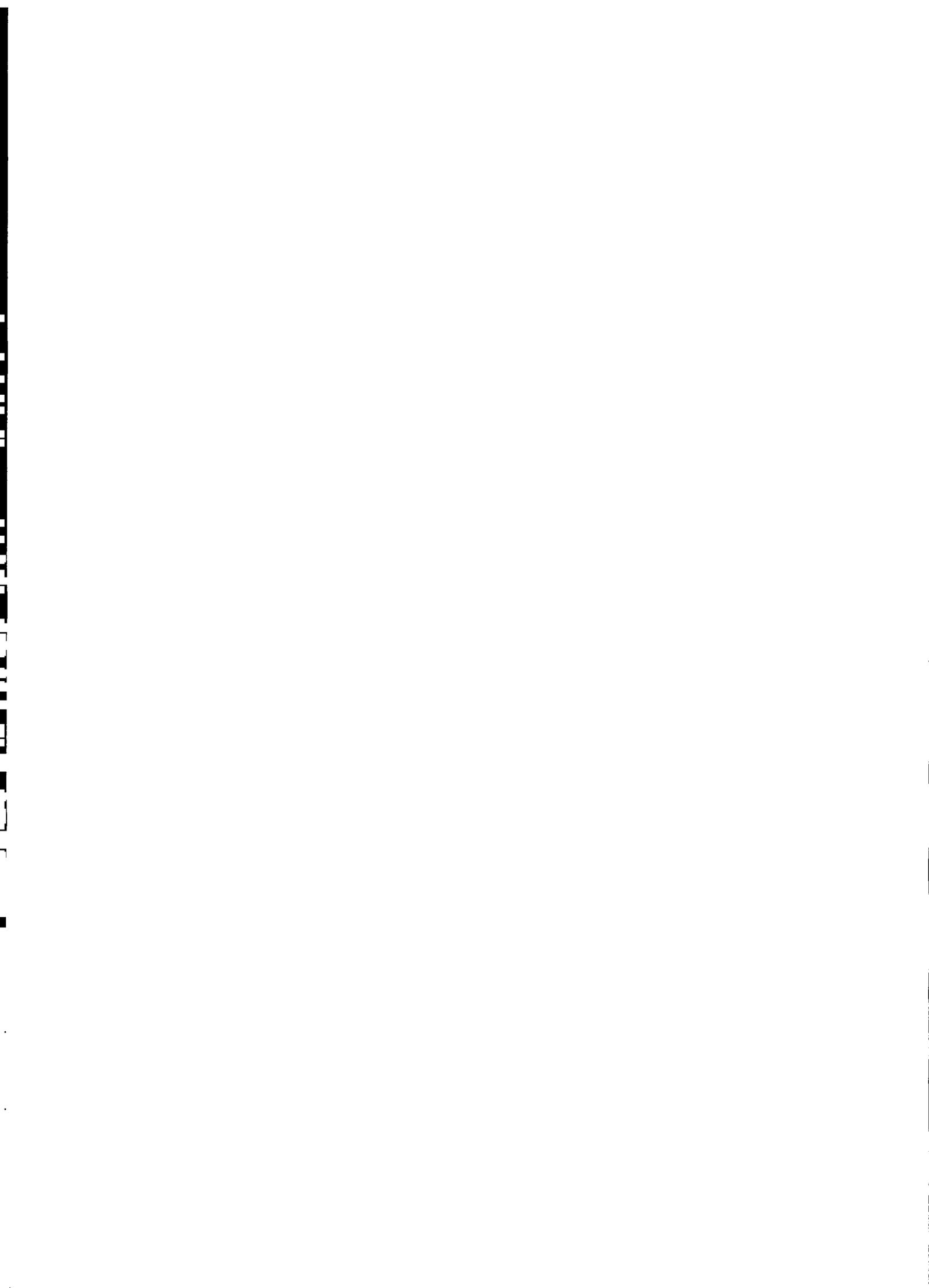
IV.1 Kesimpulan

IV.2 Saran tindak lanjut

LAMPIRAN

Lampiran I. Rencana Kinerja Tahun 2021

Lampiran II. Perjanjian Kerja Tahun 2021





BAB II PERENCANAAN KINERJA

II. 1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Inspektorat Investigasi mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Sasaran strategis Inspektorat Investigasi merupakan 2 (dua) sasaran strategis Inspektorat Jenderal, yaitu:

1. Terwujudnya Implementasi Pengawasan yang Berkualitas
2. *Organisasi Fit for Purpose*

dengan indikator pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian yang ditetapkan adalah:

- 1) **Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi;**
- 2) **Persentase tindak lanjut pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan;**
- 3) **Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM.**

II. 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 - Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Investigasi Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Implementasi pengawasan yang berkualitas	1 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Persentase	65%
		2 Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	85%
2	<i>Organisasi Fit For Purpose</i>	3 Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit	3





II. 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

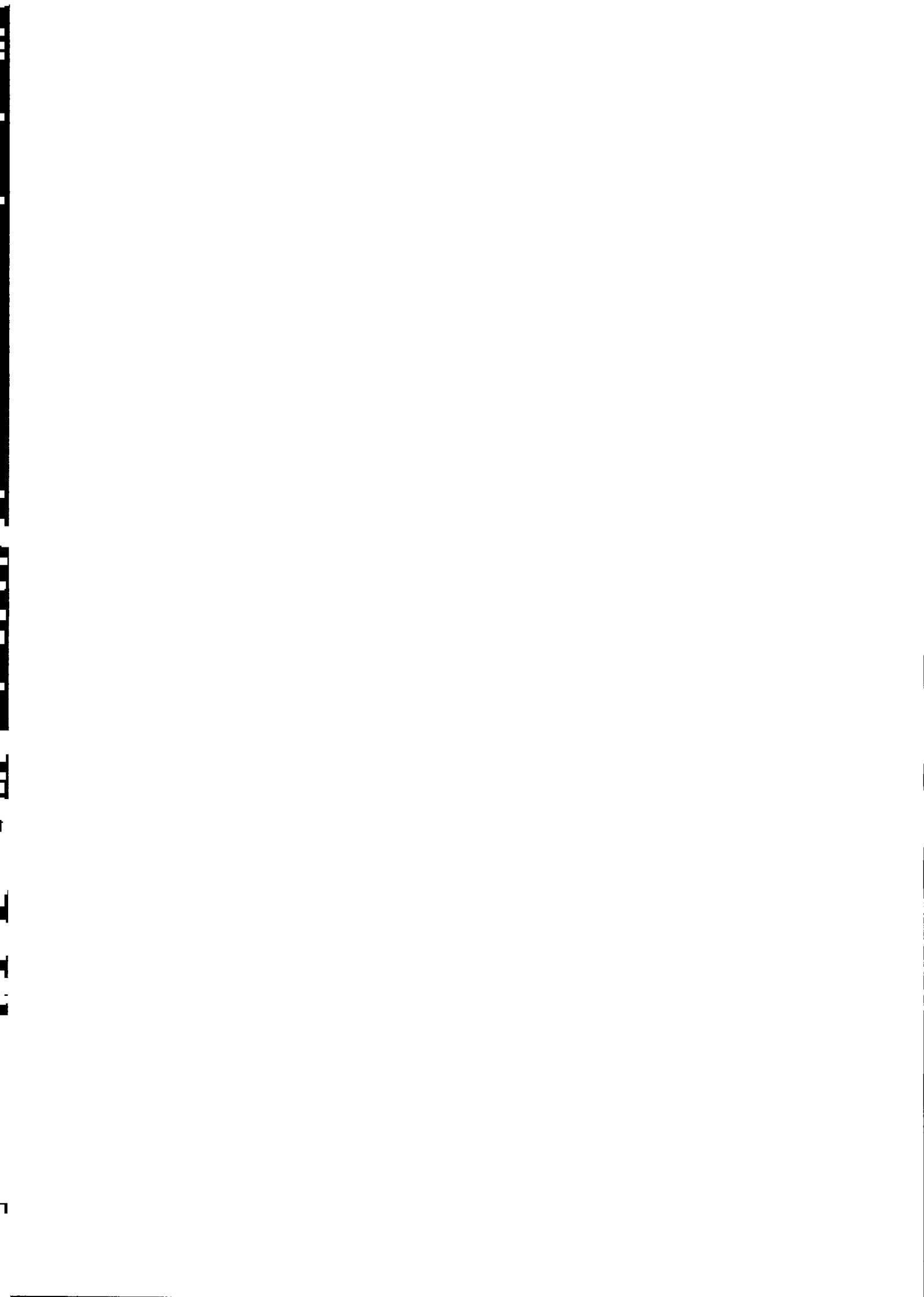
Perjanjian Kinerja adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh seorang Kepala Unit Kerja kepada Atasan Langsung. Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Inspektur Investigasi dan Inspektur Jenderal pada bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 - Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
1	Implementasi pengawasan yang berkualitas	1	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Persentase	65%
		2	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	85%
2	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	3	Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit	3

Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi pada awal Tahun 2021 menetapkan sasaran sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan indikator sebanyak 3 (tiga) kegiatan yang masing-masing telah ditetapkan target pencapaiannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan tersebut sebesar Rp.9.287.952.000,00.

Pada bulan Agustus 2021, sesuai dengan revisi perjanjian kinerja dengan memperbarui alokasi anggaran sesuai dengan pemotongan anggaran yang diberikan menjadi Rp. 4.036.080.000,00, sedangkan indikator kinerja kegiatan dan target yang diberikan tetap seperti semula.





BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

III. 1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Inspektorat Investigasi telah memanfaatkan system aplikasi *e-performance* untuk melakukan pemanfaatan capaian kinerja perbulan. Cara perhitungan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Investigasi menggunakan Indikator Kinerja *maximize* yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

III. 2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi pada tahun 2021, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

III. 2. 1. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Perjanjian Kinerja

Perbandingan realisasi kinerja terhadap target perjanjian kinerja tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi dengan realisasinya, sebagai berikut:

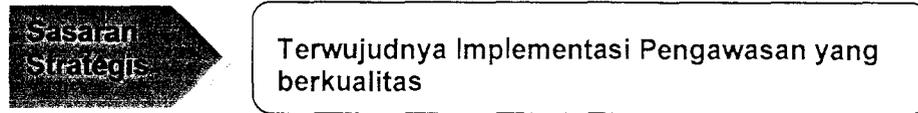
Tabel 5 - Realisasi Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran		Indikator		Target		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Implementasi pengawasan yang berkualitas	1	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Persentase	65	85,23%	131,12%
		2	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	85	100%	117,65%
2	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	3	Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit	3	17	566,67%





Sasaran yang harus dicapai dalam tahun 2021 sebanyak 2 (dua) sasaran dengan indikator sebanyak 3 (tiga) kegiatan, tingkat capaian kinerja Inspektorat Investigasi berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja dapat di ilustrasikan sebagai berikut :



a. Pencapaian Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja 1 yaitu **Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi**, Tingkat capaian verifikasi terhadap kepuasan pengawasan oleh Auditi sebesar 131,12% atau dari target 65% yang telah terealisasi sebesar 85,23% dengan perhitungan sebagai berikut:

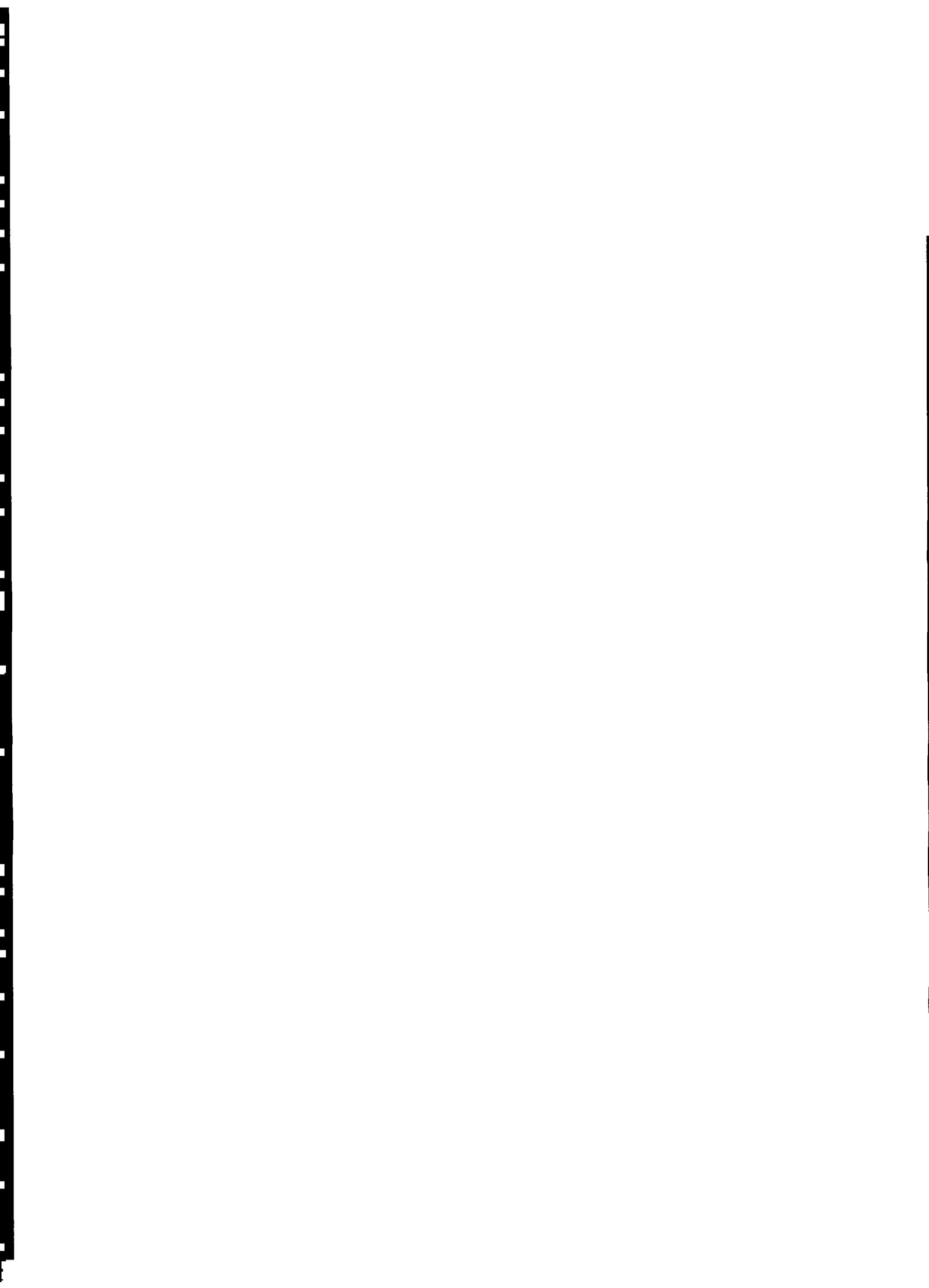
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{85,23}{65} \times 100\% = 131,12\%$$

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi menunjukkan bahwa realisasi (131,12%) lebih besar dari target yang telah ditetapkan (85,23%).

Pengukuran kepuasan pengawasan Inspektorat Jenderal bagi pengguna jasa pada Auditi dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif berupa indeks kepuasan dengan menggunakan skala *likert*.

Pelaksanaan survei dilakukan dengan metode blended, yaitu selain dilaksanakan secara online tim melakukan uji petik langsung kepada responden ke beberapa auditi. Obyek survei kepuasan pengawasan adalah Auditi yang telah selesai dilakukan kegiatan pengawasan intern (assurance dan consulting) oleh Inspektorat Jenderal di dalam kurun waktu tahun 2020 sd 2021, serta yang masuk rencana untuk dilakukan kegiatan pengawasan intern (assurance dan consulting) oleh Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut:





- 4 Auditi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- 9 Auditi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- 4 Auditi di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
- 7 Auditi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 16 Auditi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 10 Auditi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 6 Auditi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapian;
- 10 Auditi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pengolahan data hasil survei kepuasan pengawasan Inspektorat Jenderal dengan menggunakan data primer berupa kuisisioner yang disebarakan kepada sampel sebanyak 314 orang responden. Instrumen pengukuran kepuasan pengawasan Inspektorat Jenderal bagi pengguna jasa pada Auditi Kementerian Perhubungan terdiri dari 5 (lima) aspek indikator pelayanan yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty.

Nilai pernyataan dalam instrumen kuesioner ini terdiri atas pernyataan dalam skala 1-4. Nilai skala 1 adalah nilai terendah dalam rentang nilai kepuasan yang ada, artinya responden sangat tidak puas terhadap pernyataan yang diberikan dalam kuesioner. Nilai 2 adalah tidak puas, artinya rerponden tidak puas terhadap pernyataan yang diberikan di dalam kuesioner tersebut. Nilai 3 adalah puas, artinya responden adalah puas terhadap pernyataan yang diberikan di dalam kuesioner tersebut. Nilai 4 adalah sangat puas, artinya responden sangat puas dengan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selama ini

Berdasarkan hasil pelaksanaan survei kepuasan pengawasan inspektorat jenderal terhadap pengguna jasa (auditi) dapat disimpulkan sebagai berikut:





Tabel 6 - Hasil Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat Jenderal oleh Auditi Tahun 2021

Inspektorat	Nilai	Kategori	Rata-rata
Inspektorat I	79,48%	Puas	85,23%
Inspektorat II	87,49%	Sangat Puas	
Inspektorat III	85,91%	Sangat Puas	
Inspektorat IV	85,11%	Sangat Puas	
Inspektorat Investigasi	91,76%	Sangat Puas	

Secara keseluruhan tingkat kepuasan auditi terhadap kegiatan penjaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) adalah sebesar 85,23%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa dalam hal ini UPT merasa sangat puas (81,3% - 100%) terhadap kegiatan pengawasan intern (*assurance* dan *consulting*) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

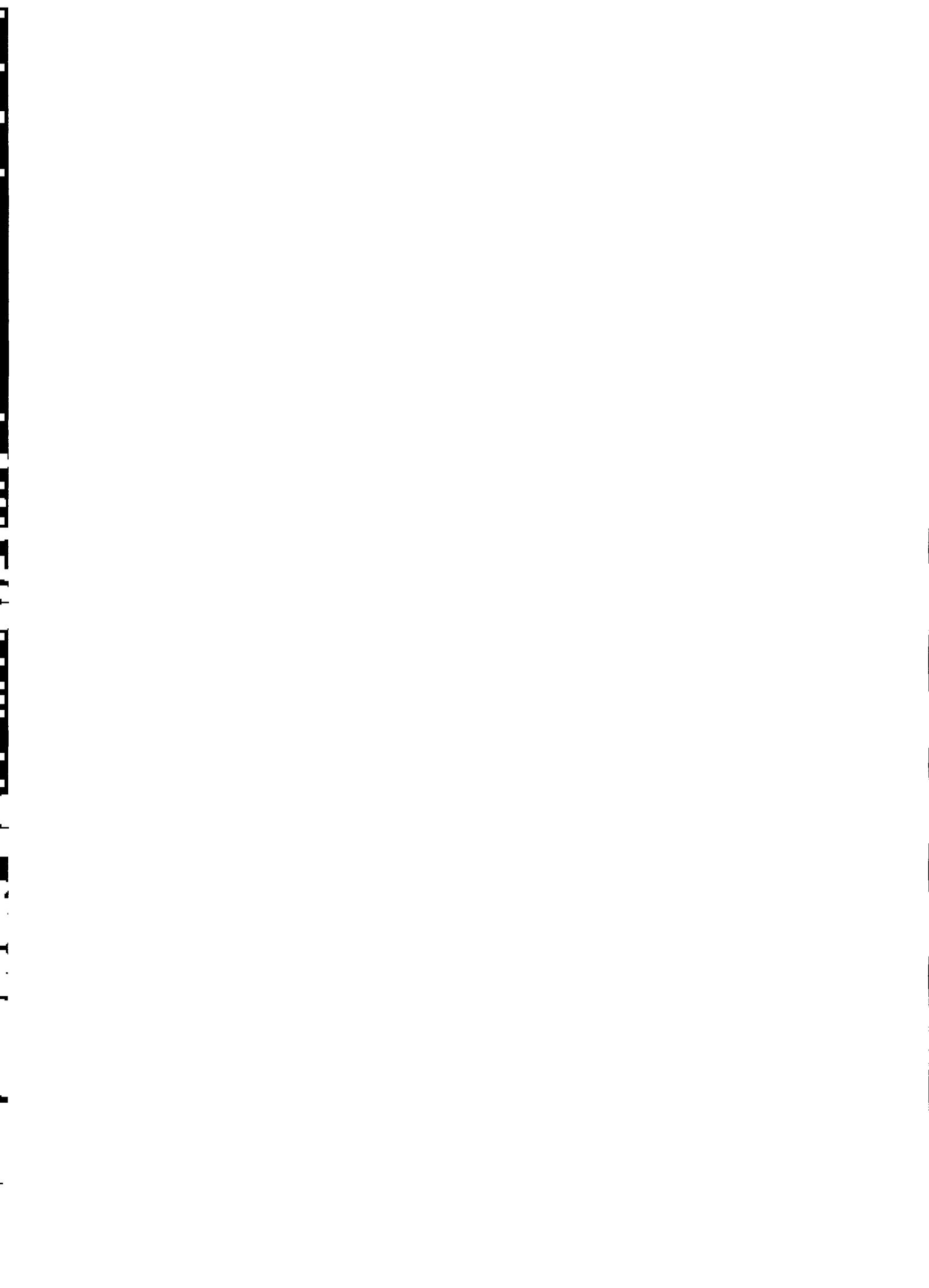
b. Pencapaian Indikator Kinerja 2

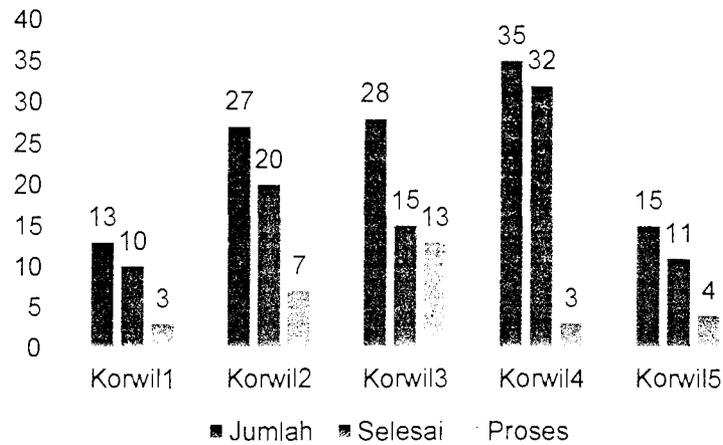
Indikator Kinerja 2 yaitu Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Tingkat capaian verifikasi terhadap Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar 100% atau dari target 85% yang telah terealisasi sebanyak 117,65% laporan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{100}{85} \times 100\% = 117,65\%$$

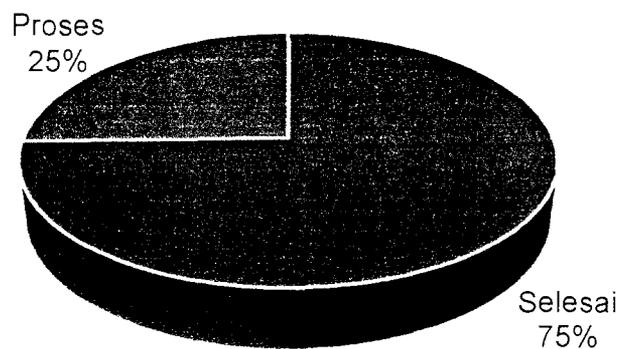
Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa realisasi (117,65%) lebih besar dari target yang telah ditetapkan (85%). berdasarkan hasil Evaluasi tahunan terhadap kegiatan SIMADU dan penyusunan laporan akhir semester tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:





Gambar 3 - Grafik Penanganan Pengaduan per Korwil

Pada bagan 1 menunjukkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi SIMADU periode Januari s.d Desember 2021. dalam bagan tersebut menyebutkan sebagian besar pengaduan telah ditangani (status selesai) berdasarkan beban tugas koordinator wilayah namun terdapat beberapa pengaduan masih dalam status proses hal ini dikarenakan masih memerlukan telaahan lebih lanjut dan tahap penyusunan laporan. Adapun prosentase tindak lanjut pengaduan secara keseluruhan yang telah ditangani oleh inspektorat investigasi sebagai berikut:



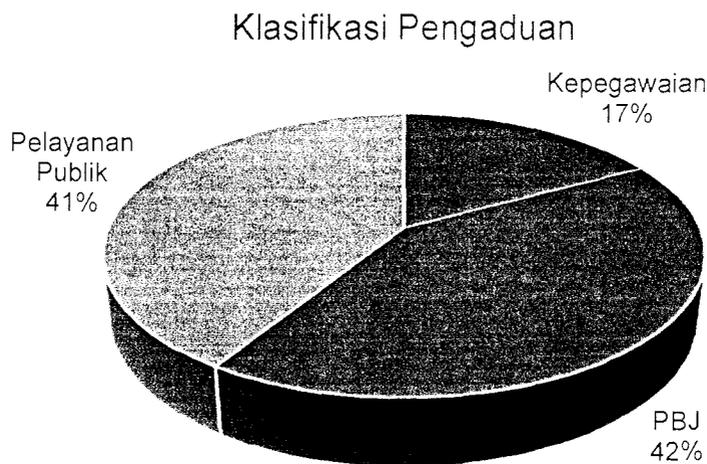
Gambar 4 - Tindak Lanjut pengaduan

Gambar diatas menunjukkan hasil capaian indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan bahwa 75% pengaduan telah selesai ditangani dan 25%





masih dalam tahap proses. Klasifikasi pengaduan masyarakat dibagi menjadi 3, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, dan Kepegawaian. Untuk Tahun 2021, jumlah pengaduan masyarakat berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:



Gambar 5 - Jumlah Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi

Berdasarkan hasil Evaluasi tahunan terhadap Tindak Lanjut Pengaduan menunjukkan bahwa dari jumlah SDM (auditor) inspektorat investigasi telah berhasil mengkoordinir penanganan dan pemantauan pengaduan masyarakat melebihi target yang telah ditetapkan.



Organisasi *fit for purpose*

c. Pencapaian Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja 3 yaitu Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM, Tingkat capaian Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK WBBM adalah 17 (tujuh belas) unit kerja dari target 3 (tiga) unit kerja. Sehingga pencapaian adalah sebesar 566,67%, dengan perhitungan sebagai berikut:





$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{17}{3} \times 100\% = 566,67\%$$

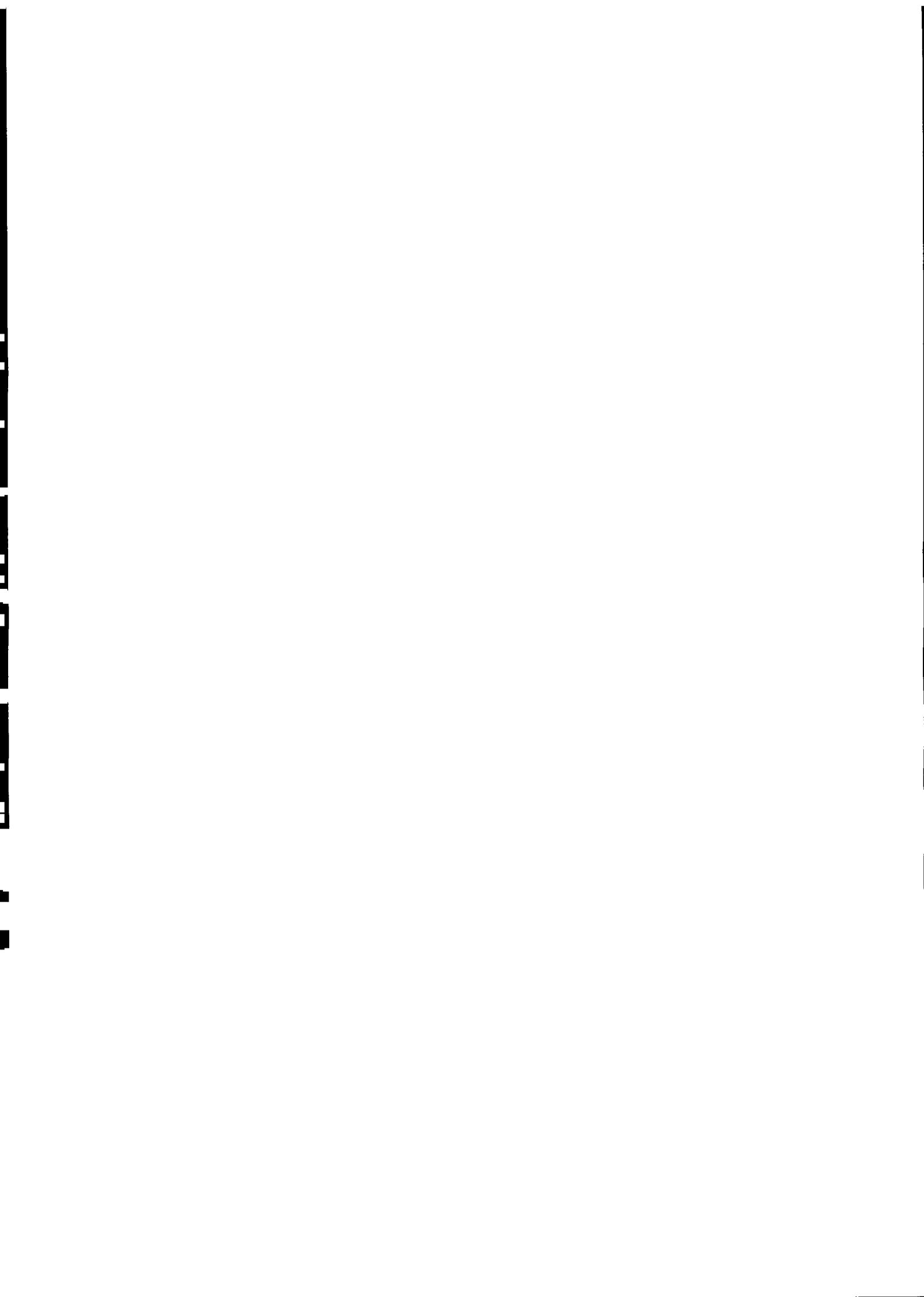
Pada tahun 2021, diusulkan 19 (sembilan belas) unit kerja untuk menjadi nominasi WBBM dan 59 (lima puluh sembilan) unit kerja untuk menjadi nominasi WBK. Adapun hasil dari evaluasi pengelolaan zona integritas sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kerja tidak lolos evaluasi administrasi
- 26 (dua puluh enam) unit kerja gugur pada tahap survei
- 3 (tiga) unit kerja usulan WBBM dan 23 (dua puluh tiga) unit kerja usulan WBK;
- 34 (tiga puluh empat) unit kerja gugur pada tahapan desk evaluasi dan verifikasi lapangan,
- 12 (dua belas) unit kerja usulan WBBM dan 22 (dua puluh dua) unit kerja usulan WBK;
- 4 (empat) unit kerja berhasil memperoleh predikat WBBM (21,05%)
- 13 (tiga belas) unit kerja memperoleh predikat WBK (22,03%)

Adapun unit kerja Kemenhub tahun 2021 yang mendapatkan predikat WBK/WBBM adalah sebagai berikut:

Tabel 7- Daftar Unit Kerja Kemenhub yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM

Predikat WBBM	Predikat WBK
1. Otoritas Bandara Wilayah IV Bali	1. Direktorat Sarana Transportasi Jalan
2. Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya	2. Satuan Pelayanan Terminal A Tirtanadi
3. Otoritas Bandara Wilayah VI Padang	3. Satuan Pelayanan Terminal A Jatijajar
4. Balai kesehatan Penerbangan	4. Satuan Pelayanan Terminal A Baranangsiang
	5. Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak
	6. Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok
	7. Distrik Navigasi Kelas I Dumai
	8. Distrik Navigasi Kelas I Belawan
	9. Otoritas Bandara Wilayah I Tangerang





Predikat WBBM	Predikat WBK
	10. Otoritas Bandara Wilayah II Medan 11. Otoritas Bandara Wilayah VIII Manado 12. Balai Pengujian Perkeretaapian 13. Puslitbang Transportasi Jalan dan KA

Berdasarkan evaluasi hasil verifikasi lapangan, kelemahan dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas WBK/WBBM ditemukan sebagai berikut:

1. Belum terlihat adanya pemahaman yang utuh terhadap substansi 6 (enam) area perubahan pembangunan zona integritas dari pimpinan dan pegawai unit kerja;
2. Inovasi program dan kegiatan pelayanan belum bisa menjawab isu strategis yang sesuai dengan core business;
3. Sudah ada Inovasi teknologi informasi namun belum teruji manfaatnya karena baru berjalan selama satu tahun;
4. Implementasi sistem pengawasan yang belum mantap, masih pada sekedar *public campaign*, yaitu belum terlihat keterlibatan pimpinan dalam mengawal pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan di lapangan;
5. Unit kerja belum sepenuhnya mengimplementasi mitigasi resiko terhadap pelaksanaan tugas dan area yang berpotensi terjadi pelanggaran integritas;
6. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hanya bersifat formalitas, hasil Survey kepuasan belum digunakan dan ditindaklanjuti secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan;
7. Kematangan dan keberlanjutan perubahan dari WBK ke WBBM masih belum optimal (untuk usulan WBBM sebaiknya 2 tahun setelah meraih predikat WBK);
8. Kurangnya studi banding / best practice yang dilakukan antar UPT;
9. Perlunya dibangun suatu sistem pengawasan yang terintegrasi antara UPT yang setipe.

Dari evaluasi yang telah dilaksanakan, Inspektorat Investigasi merekomendasikan kepada:



1. Sesditjen/Sesbadan melakukan:
 - a. Sosialisasi strategi pembangunan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dan Pembangunan ZI;
 - b. Monitoring keberlanjutan pembangunan zona integritas dan asistensi pada unit kerja berpredikat WBK dalam rangka persiapan untuk diusulkan memperoleh WBBM;
 - c. Evaluasi dan asistensi pada unit kerja yang belum berhasil lolos dalam pemberian predikat WBK dan WBBM.
2. Unit Kerja Nominator WBK/WBBM melakukan:
 - a. Menindaklanjuti temuan APIP dan BPK;
 - b. Menggunakan saran dan masukan dari hasil survey kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi SOP;
 - c. Melakukan studi banding ke Unit Kerja yang telah memperoleh WBK/WBBM;
 - d. Meningkatkan peran UKI (Unit Kepatuhan Internal).

III. 2. 2. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020-2021

Realisasi Kinerja Inspektorat Investigasi melebihi target kinerja yang telah ditetapkan baik untuk Tahun 2020 maupun Tahun 2021. Untuk indikator Tingkat Kepuasan Pengawasan, mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 3,21%. Realisasi persentase tindak lanjut pengaduan untuk tahun 2020 dan 2021 sama yaitu 100%, artinya sejak tahun 2020 s.d. 2021 semua pengaduan telah ditindaklanjuti di akhir tahun. Sedangkan indikator jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun 2020 tidak terdapat target kinerja dikarenakan adanya perubahan arah kebijakan Pimpinan selama masa Pandemi Covid-19 dan penyesuaian target kinerja sesuai dengan revisi perjanjian kinerja tahun 2020. Secara rinci perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 sebagai berikut:





Tabel 8- Perbandingan Target - Realisasi Kinerja Tahun 2020-2021

Sasaran	Indikator	2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1 Implementasi pengawasan yang berkualitas	1 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	63%	82,015%	65	85,23%
	2 Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	82%	100%	85	100%
2 Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	3 Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	-	-	3	17

III. 2. 3. Perbandingan Target terhadap Realisasi Kinerja tahun 2021 dalam Renstra Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja selalu meningkat dari Tahun 2020 untuk semua indikator, hal ini sejalan dengan peningkatan target pada Renstra 2020-2024. Secara rinci perbandingan antara target dan realisasi kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 9 - Perbandingan Target dan Realisasi dalam Renstra 2020-2024

Sasaran	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
		Tar get	Real isasi								
1 Implementasi pengawasan yang berkualitas	1 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	63 %	82,0 2%	65	85,2 3%	67 %		69%		71 %	
	2 Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	82 %	100 %	85 %	100 %	87 %		90%		95 %	
2 Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	3 Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	-	-	3	17	3		3		3	



III. 2. 4. Analisis Penyebab keberhasilan serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021

Keberhasilan Inspektorat Investigasi dalam pencapaian target kinerja tidak lepas dari dukungan pimpinan yang kondusif dan aktif dalam upaya penyelesaian permasalahan khususnya penanganan pengaduan. Selain itu keberhasilan atas pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Kekompakan dan kerja sama tim Inspektorat Investigasi dalam pencapaian target kinerja Tahun 2021.
2. Para Auditor telah dibekali dengan Pendidikan dan pelatihan audit sebagai modal dasar penanganan pengaduan.
3. Anggaran yang mencukupi, meskipun dalam perjalanannya terdapat refocusing dan penghematan anggaran yang cukup signifikan.

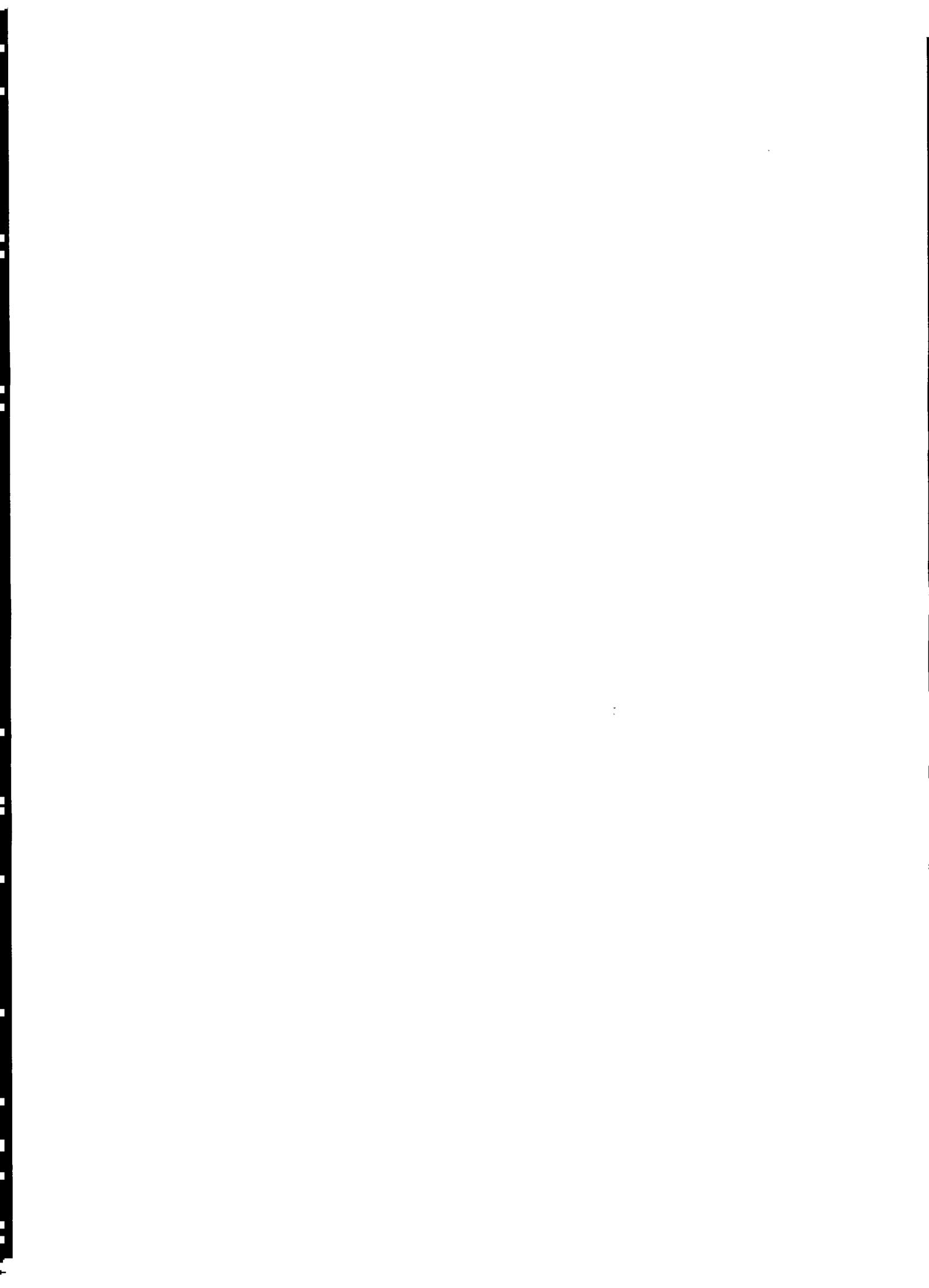
Beberapa solusi untuk menunjang pencapaian kinerja yang akan datang sebagai berikut:

1. Sarana yang audit investigasi perlu dilakukan peningkatan dalam hal ini digital forensik untuk mendukung adanya tugas audit investigatif seiring dengan meningkatnya teknologi.
2. Pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan perlu ditingkatkan sebagai modal utama dalam penyelesaian tugas.
3. Kerjasama dengan beberapa pihak (seperti aparat penegak hukum atau LKPP) untuk mendukung pencapaian target kinerja di tahun yang akan datang.

III. 2. 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang dimiliki dalam menunjang pencapaian kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia sebagai komponen utama yang terdiri dari Jabatan fungsional Tertentu (Auditor) dan Tata Usaha serta dukungan dari pimpinan.
2. Sarana dan prasarana yang menunjang dalam penugasan pencapaian kinerja Tahun 2021.
3. Penggunaan anggaran yang maksimal.



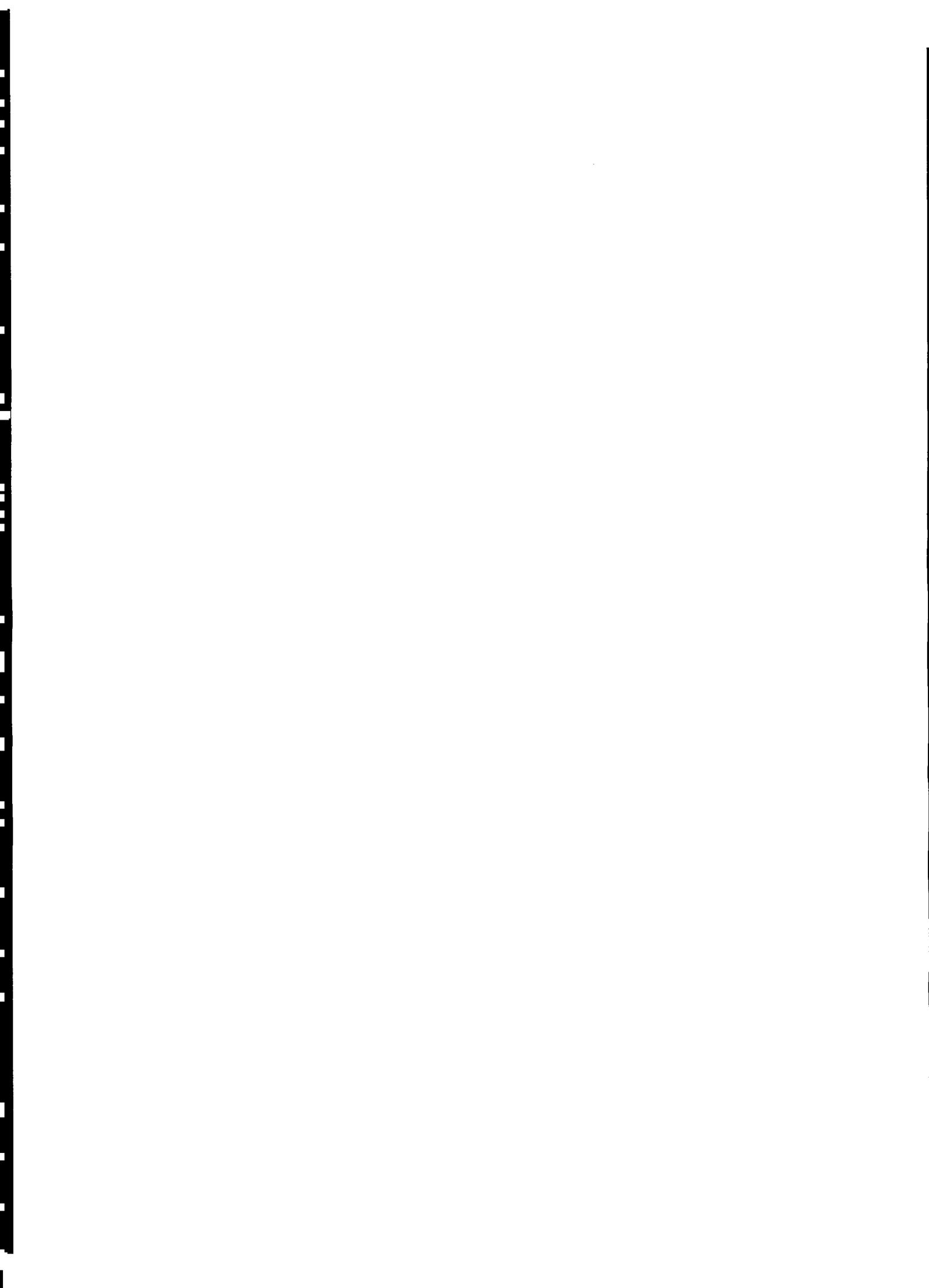


III. 3. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Program Pengawasan dan Peningkatan Aparatur Kementerian Perhubungan pada Inspektorat Investigasi sangat efektif dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.036.080.000,00 daya serap anggaran 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 - Realisasi Anggaran Tahun 2021

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
ANGGARAN INSPEKTORAT INVESTIGASI	4.036.080.000	4.036.080.000	100,00
EAK 002 Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)	2.200.955.000	2.200.955.000	100,00
EAK 005 Pemantauan, Pengawasan dan Supervisi	617.994.000	617.994.000	100,00
EAK 007 Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja Itjen	40.000.000	40.000.000	100,00
EAK 008 Pencegahan KKN	56.035.000	56.035.000	100,00
EAK 009 Pengawasan dan Pengendalian CPNS	254.471.000	254.471.000	100,00
EAK 010 Pengelolaan Zona Integritas	119.726.000	119.726.000	100,00
EAK 011 Penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja	371.472.000	371.472.000	100,00
EAK 012 Survey Pengawasan	268.038.000	268.038.000	100,00
EAK 014 Pengelolaan Aplikasi Dukungan Pengawasan	107.385.000	107.385.000	100,00





BAB IV PENUTUP

IV. 1. Kesimpulan

Pencapaian Kinerja Untuk capaian kinerja Inspektorat Investigasi pada Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Inspektorat Investigasi telah melaksanakan Program kegiatan Kementerian Perhubungan dengan indikator kinerja kegiatan secara keseluruhan tercapai. Dengan demikian, seluruh Sasaran Strategis pada tahun 2021 tercapai yaitu Terwujudnya Implementasi Pengawasan yang Berkualitas;
2. Berdasarkan hasil evaluasi perhitungan pengukuran kinerja, nilai capaian kinerja inspektorat Investigasi sebagai berikut:

Sasaran		Indikator		Target		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Implementasi pengawasan yang berkualitas	1	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Persentase	65	85,23%	131,12%
		2	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	85	100%	117,65%
2	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	3	Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit	3	17	566,67%

3. Secara keseluruhan tingkat kepuasan auditi terhadap kegiatan penjaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) adalah sebesar 85,23%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa merasa sangat puas terhadap kegiatan penjaminan (assurance);
4. Berdasarkan pengaduan yang masuk selama tahun 2021 yaitu 122 pengaduan, semua telah ditindaklanjuti dengan status pengaduan selesai sejumlah 71 pengaduan, proses sebanyak 28 pengaduan, dilimpahkan ke instansi lain sebanyak 8 pengaduan, serta 14 pengaduan ditolak;
5. Jumlah unit kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM sebanyak 17 unit kerja dengan 4 unit kerja mendapatkan predikat WBBM dan 13 unit kerja mendapatkan predikat WBK;
6. Realisasi keuangan sebesar 4.036.080.000,- atau 100,00% dari pagu anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan sangat efektif.





IV. 2. Saran Tindak Lanjut

1. Perencanaan Kinerja

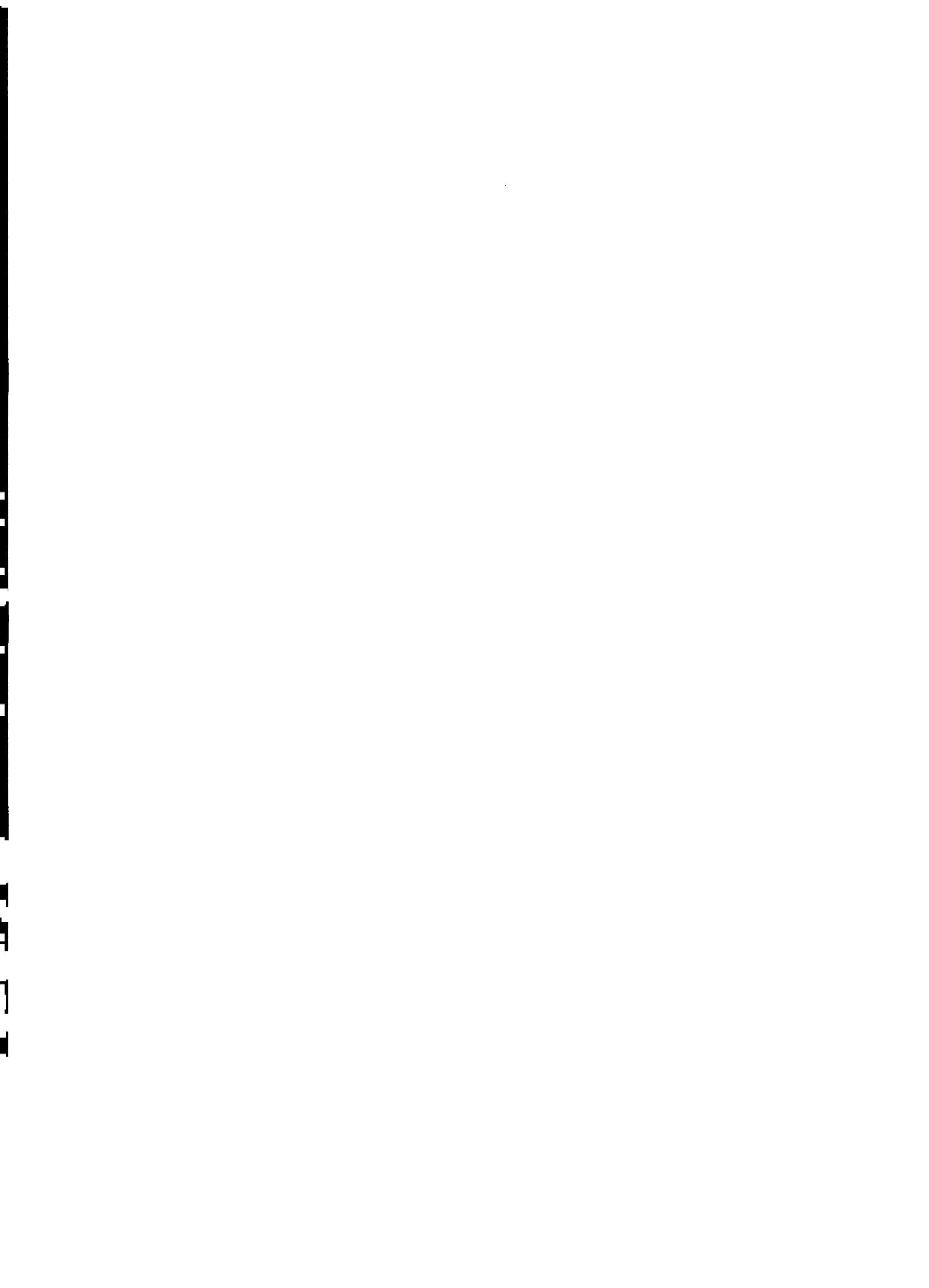
Perlu adanya keselarasan dalam dokumen perencanaan, indikator kinerja pada dokumen RKA sama dengan indikator kinerja dalam Renstra, termasuk keselarasan antara kebijakan kegiatan, indikator kinerja kegiatan unit kerja Eselon II, serta indikator kinerja pada Renstra dan Perjanjian Kinerja.
2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja berbasis web melalui e-performance masih terdapat kendala dan perlu dilakukan revaluasi kembali terhadap jumlah perhitungan dalam pengisian data tiap bulannya.
3. Pelaporan Kinerja

Dalam pelaporan kinerja Inspektorat Investigasi sudah melaksanakan scan data secara keseluruhan dalam pengarsipan surat masuk dan surat keluar sehingga mempermudah pencarian data yang dibutuhkan dan lebih efisien dalam penyimpanan berkas.
4. Evaluasi Kinerja

Monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan per triwulan sebaiknya dijadikan dasar reward dan punishment prestasi kinerja
5. Capaian Kinerja

Pelaksanaan seluruh kegiatan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan pada Inspektorat Investigasi sangat efektif, dengan indikator kinerja kegiatan secara keseluruhan tercapai yaitu Terwujudnya Implementasi Pengawasan yang Berkualitas.





RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET

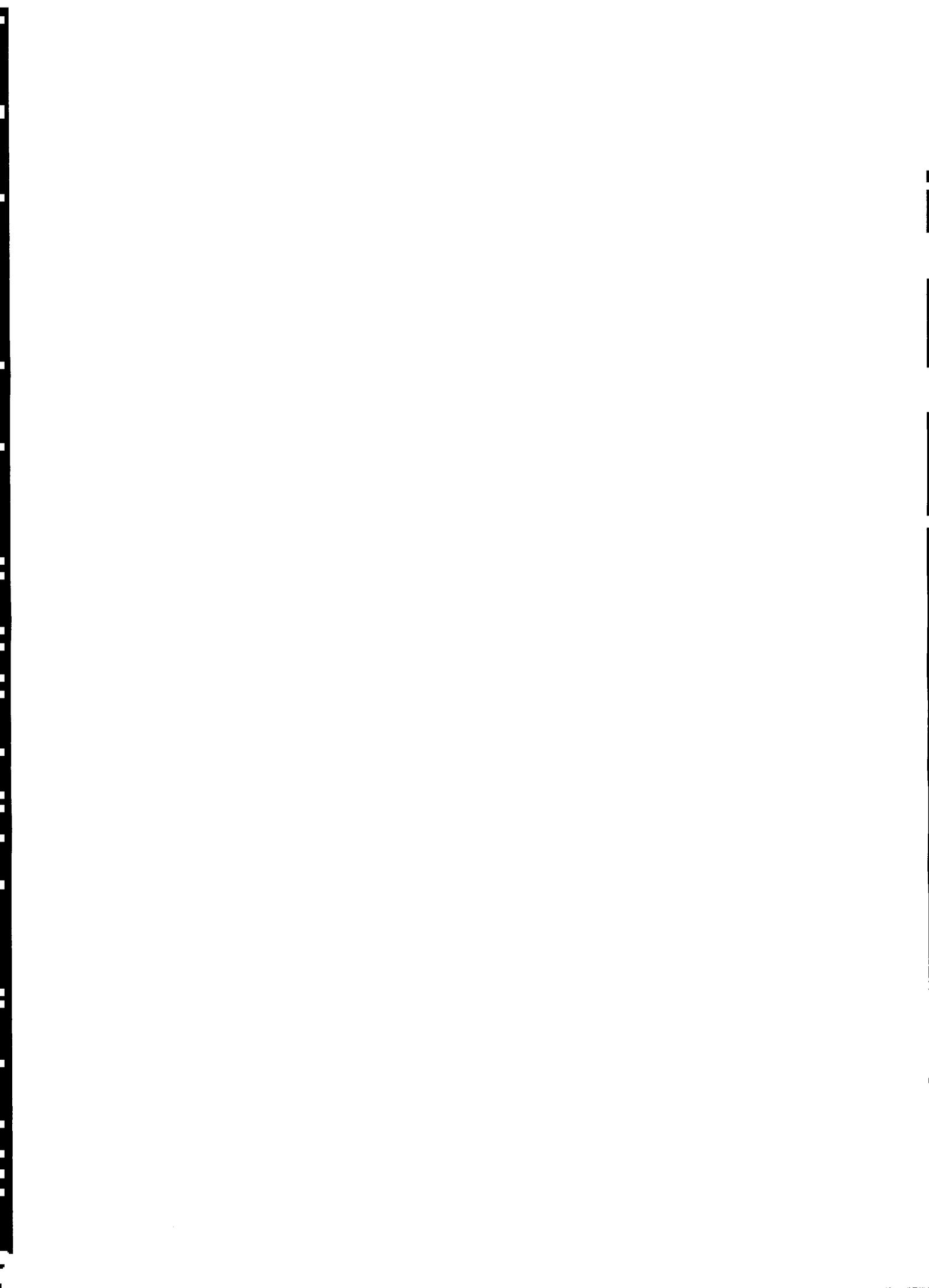
Jakarta

INSPEKTUR INVESTIGASI

EDDY GUNAWAN

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19630208 198303 1 002







REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT INVESTIGASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHJU ADJI HERPRIARSONO**
Jabatan : Inspektur Investigasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **GEDE PASEK SUARDIKA**
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2021

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR JENDERAL

GEDE PASEK SUARDIKA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196307171989031002

PIHAK PERTAMA,
INSPEKTUR INVESTIGASI

WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196510221992031001

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Implementasi pengawasan yang berkualitas	1. Tingkat kepuasan pengawasan oleh Auditori	Persentase	65
		2. Persentase tindak lanjut pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	85
2.	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	3. Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit	3

Kegiatan :

Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Investigasi

Anggaran

Rp 4.036.080.000,-

Disetujui,

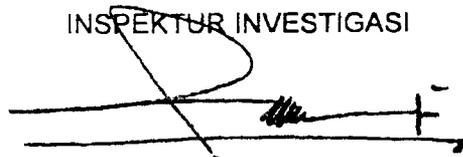
INSPEKTUR JENDERAL



GEDE PASEK SUARDIKA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630717 198903 1 002

Jakarta, 30 Agustus 2021

INSPEKTUR INVESTIGASI



WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196510221992031001

